

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# Gerak Cepat Heru Program Normalisasi Kali Ciliwung

**JAKARTA (Poskota)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bergerak cepat dalam menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau langsung salah satu titik lokasi proyek normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (8/5/2023). Untuk wilayah Rawajati, Jakarta Selatan, masih ada lahan yang akan dibebaskan. Hal ini merupakan lanjutan dari pembebasan lahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Sehingga, lahan yang dibebaskan di Rawajati sepanjang sekitar 1 kilometer. Sementara itu, berdasarkan data dari BBWSCC, untuk proses pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, telah dilakukan pembangunan sheet pile (biasa disebut turap/tanggul) sepanjang 500 meter.

"Hari ini kami melihat perkembangan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Memang ada beberapa poin yang masih terdapat kendala, yang pertama surat tanah warga hilang. Hal ini sedang diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Asalkan ada surat keterangan hilang dari Kepolisian, mudah-mudahan bisa diproses secepatnya," ujar Heru.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menyebut, terdapat 12 surat pengakuan hak (SPH) tanah milik warga setempat untuk lahan belum bersertifikat yang hilang. Seperti diketahui, dalam meningkatkan kualitas hak milik tanah bagi seseorang, SPH tanah diperlukan sebelum disahkan menjadi sertifikat tanah yang resmi.

"Selain itu, ada lagi permasalahan yang ditemukan, yaitu luas lahan yang tercantum di surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sama dengan kenyataan di lapangan, di mana luas yang ada di lapangan lebih besar. Mudah-mudahan semua permasalahan yang

ditemukan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat," jelas Pj. Gubernur Heru didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menambahkan, proses pengerjaan normalisasi tersebut terus dikebut, baik dari sisi pembangunan maupun pembebasan lahan. Dalam proses pembangunan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

"Pada dasarnya, pengerjaan normalisasi ini dijalankan sesuai arahan (Pemerintah Pusat). Kami bersama Kementerian ATR/BPN dan BBWSCC fokus menyelesaikan persoalan di lapangan (terkait pembebasan lahan dan pembangunan). Seperti arahan Penjabat Gubernur, kami akan memprosesnya untuk segera diselesaikan," tutur Yusmada.

## Dengar Curhatan Warga

Dalam kunjungannya kali ini, seorang warga RW 7 Rawajati bernama Siti Aminah tiba-tiba langsung menghampiri Heru. Siti yang merupakan salah satu warga terdampak proyek normalisasi mempertanyakan kapan uang ganti rugi bisa dicairkan.

"Kapan gitu loh (ganti rugi dibayarkan). Karena sekarang ini, jangankan berjam-jam, 2 jam saja hujan deras di Jakarta sudah banjir," kata Siti di lokasi, Senin (8/5/2023). "Rumah Ibu yang mana?" tanya Heru. "Itu Pak, yang tulisan RT 08," jawabnya.

Heru beserta jajaran pun kemudian mengecek data milik Siti Aminah. Setelah ditelusuri, diketahui proses pencairan ganti rugi belum bisa dilakukan

karena ada dokumen yang hilang. Karena itu, Heru meminta Siti terlebih dahulu mengurus surat kehilangan ke kantor polisi.

"Ibu Siti Aminah terbit PBB 2010-2022. Kemudian PBB 2019 sudah lunas. Kemudian surat tanda laporan kehilangan barang ini yang diproses," kata Perwakilan BPN Jakarta Selatan Sigit. "Ibu lagi proses surat kehilangan?" tanya Heru. "Iya Pak," jawab Siti.

"Ya sudah Ibu proses di kepolisian. Nanti diundang oleh Pak Sigit (BPM). Ibu proses aja, kehilangannya dulu zaman banjir ya?" tanya Heru lagi. "Iya Pak, banjir tahun '96," jawab Siti. "Ya sudah besok ke kantor polisi, Ibu kan minta dibayar tapi syaratnya kan urus ke kantor polisi," jawab Heru.

Heru Budi memastikan bahwa warga yang terdampak penggusuran akibat normalisasi Kali Ciliwung akan mendapatkan ganti rugi. "Dibayar kok. Nanti pasti di ganti," ujar Heru di lokasi.

Bahkan, menurut mantan Wali Kota Jakarta Utara ini di RW 07 Rawajati, Pancoran ini sudah ada warga yang pergi haji karena dapat ganti rugi yang diberikan Pemprov DKI akibat normalisasi Kali Ciliwung. "Ini RW 07. Ini diganti lahannya semua. Ada yang sudah naik haji kok," tukas Heru.

Diketahui, untuk memastikan warga yang digusur mendapatkan ganti rugi, Pemprov DKI pun telah menganggarkan Rp 700 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023.

Adapun pembebasan lahan itu akan dilakukan di empat kelurahan, yakni Cililitan (Jakarta Timur) 0,8 hektar, Rawajati (Jakarta Selatan) 1,5 hektar, Cawang (Jakarta Timur) 2,25 hektar, dan Kampung Melayu (Jakarta Timur) 1,95 hektar.

(Aldi/ham)